

BAB III

ANALISIS PENOLAKAN JERMAN TERHADAP KEANGGOTAAN PENUH TURKI DI UNI EROPA

Turki adalah negara yang sudah sejak lama ingin bergabung dengan Uni Eropa, sejak lama juga Turki belum berhasil menjadi anggota Uni Eropa. Keinginan Turki untuk menjadi anggota Uni Eropa disebabkan oleh beberapa faktor utama yaitu: 1) Faktor sejarah, saat Turki melakukan revolusi, pernyataan diri sebagai salah satu negara Eropa juga muncul, meski secara geografis hanya sebagian kecil wilayah Turki yang berada di benua Eropa, 2) Faktor ekonomi, Uni Eropa merupakan organisasi yang telah berhasil membuat negara negara anggotanya maju dalam bidang ekonomi, organisasi tersebut memaksa negara anggotanya untuk mengikuti arus politik ekonomi yang terbangun sehingga kemajuan dibidang ekonomi akan lebih cepat (Sheehan, 2004, hal. 18-40), 3) Faktor politik dan keamanan, adanya negara negara besar yang cukup maju dibidang politik, militer dan keamanan seperti Jerman, Perancis, dan Rusia membuat Uni Eropa dapat menjamin keamanan kawasan (Commission, 2004).

Uni Eropa telah memberi kesempatan kepada Turki untuk menjadi anggota Uni Eropa dengan menyatakan Turki sebagai calon anggota Uni Eropa. Turki harus memenuhi kriteria *Kopenhagen* dan *Acquis* sebagai negara di Balkan Eropa yang secara khusus memiliki aturan tambahan (European Commission, 2018). Turki resmi menjadi calon anggota pada tahun 1999 dan pada tahun 2004 Turki dinyatakan memenuhi syarat untuk memulai proses negosiasi pada 3 Oktober 2005 secara resmi.

Negosiasi Turki di Uni Eropa dilakukan untuk membahas 35 bab yang harus diterapkan Turki sebagai syarat untuk menjadi anggota Uni Eropa. Negosiasi yang (European Commission, 2018).

Pada bab sebelumnya telah menjelaskan komponen dari teori konstruktivisme yaitu struktur dan agen untuk menganalisa penyebab dari penolakan Jerman terhadap keanggotaan Turki di Uni Eropa. Arah politik luar negeri Jerman memberikan sedikit gambaran bagaimana Jerman memiliki konsentrasi khusus dalam menjaga kesejahteraan di kawasan Eropa. Ideologi Uni Eropa merupakan pembentukan karakter dari kawasan sehingga Jerman sebagai salah satu pendiri Uni Eropa dan negara dengan tingkat perekonomian tertinggi di Uni Eropa memiliki tanggung jawab dalam menjaga ideologi dan kesejahteraan di kawasan tersebut.

Bab ini akan menganalisis proses konstruksi ide atau pendapat yang membuat Jerman menganggap Turki sebagai rival sehingga menolak Turki untuk menjadi anggota Uni Eropa. Merujuk pada teori konstruktivisme bahwa kebijakan agen dipengaruhi oleh struktur internasional dan pola interaksinya dengan negara negara lain maka penulis akan membagi bab ini dalam dua pembahasan yang menjadi faktor pendorong Jerman untuk menolak Turki, yaitu: 1) Pandangan Jerman terhadap Turki sebagai rival yang didasarkan pada kemampuan Turki dalam memenuhi *copenhagen criteria* dan *acquis criteria* yang merupakan turunan dari konstitusi Uni Eropa. kriteria tersebut dibentuk oleh Uni Eropa untuk mengatur calon anggota agar dapat menahan diri dalam menjalankan kebijakan baik dalam maupun luar negeri agar tidak melewati batas prinsip dan nilai nilai Uni Eropa sebelum berintegrasi secara resmi

kedalam Uni Eropa. 2) Jerman memandang Turki sebagai rival karena terjadi konflik bilateral dengan Turki dan kondisi intersubjektivitas Turki dengan Jerman atau Uni Eropa yang didasarkan pada tiga variabel efisien dalam master variabel.

1.1 Pandangan Jerman terhadap kemampuan Turki dalam memenuhi kriteria Uni Eropa

Menjadi anggota Uni Eropa merupakan salah satu usaha sebuah negara untuk menjalani intersubjektivitas dalam identitas kolektif yang telah terbentuk di Uni Eropa. Salah satu variabel penting dan mendasar dalam pembentukan identitas kolektif adalah *self-restraint* (menahan diri). Negara bukanlah institusi yang dapat bergerak sendiri melainkan ada manusia yang menggerakkan negara dengan perubahan signifikan yang mungkin dialami oleh suatu negara. Oleh karenanya struktur identitas kolektif dibentuk untuk menahan aktor aktor individu yang berkuasa didalam sebuah negara agar tidak melewati batas dalam bertindak dan menghindari struktur sosial makro menjadi konfliktual. Dibentuknya sebuah konstitusi merupakan representasi dari batasan bagi aktor untuk bergerak. kesepakatan baik secara konstitusi ataupun tradisi dan budaya dapat menjadi batasan. Uni Eropa sendiri memiliki konstitusi yang mengatur batasan dari para aktor baik penguasa atau masyarakat dalam bergerak. Dalam proses calon anggota, Uni Eropa memiliki sebuah prosedur dalam konstitusinya untuk membuat calon anggota dapat berintegrasi dalam identitas kolektif. Hal ini kemudian menuntut Turki menahan diri dari segala batasan yang telah diciptakan oleh Uni Eropa.

Penulis akan melihat pandangan Jerman terhadap Turki dalam memenuhi *copenhagen criteria* dan *Acquis criteria* sebagai prosedur untuk menjadi anggota Uni Eropa. Jerman selalu melakukan pengawasan agar *copenhagen criteria* benar benar dilaksanakan oleh Turki sebelum menjadi anggota Uni Eropa. *Copenhagen criteria* itu sendiri berisi tiga poin utama yaitu: 1) Lembaga yang stabil dan mampu menjamin demokrasi, supremasi hukum, hak asasi manusia dan menghormati serta melindungi masyarakat minoritas, 2) Ekonomi pasar yang berfungsi dan kapasitas untuk mengatasi persaingan dan kekuatan pasar di Uni Eropa, 3) Kemampuan untuk mengambil dan menerapkan secara efektif kewajiban keanggotaan, termasuk kepatuhan terhadap tujuan serikat politik, ekonomi dan moneter (European Commission, 2018).

Jerman adalah negara Eropa yang menjadi mitra paling besar bagi Turki. Sehingga Jerman menjadi salah satu penghubung yang sangat penting untuk meningkatkan kerja sama antara Turki dan Uni Eropa secara umum dan secara khusus pada masalah pencalonan Turki ke Uni Eropa. Kondisi tersebut menciptakan posisi penting Jerman bagi Turki untuk masuk Uni Eropa dan posisi penting bagi Uni Eropa dalam melakukan kerja sama dengan Turki, disisi lain Jerman memang salah satu pemimpin Uni Eropa yang tentunya memiliki kekuatan dalam proses negosiasi. hubungan dekat Turki dan Jerman seharusnya mampu membawa kemudahan bagi Turki dalam proses keanggotaanya, meski Jerman pernah mendukung keanggotaan Turki, namun pada akhirnya Jerman juga mendapati kekurangan Turki untuk bergabung dengan Uni Eropa. Dinamika hubungan bilateral Jerman dan Turki

mengalami perubahan yang membuat Jerman semakin yakin bahwa Turki tidak layak menjadi bagian dari Uni Eropa. Berdasarkan *copenhagen criteria*, berikut pandangan Jerman terhadap Turki dalam proses keanggotaannya di Uni Eropa yang harus menjamin stabilitasnya dalam beberapa bidang yaitu:

1. Demokrasi

Demokrasi adalah identitas utama bagi Uni Eropa dan Jerman itu sendiri. Jerman memandang bahwa demokrasi di Turki berada dalam krisis karena beberapa kebijakan pemerintah yang dianggap melanggar prinsip demokrasi Uni Eropa, seperti saat Turki melakukan penangkapan terhadap demonstran. Stabilitas Demokrasi Turki semakin diragukan oleh Jerman sejak Erdogan menjadi presiden karena beberapa kebijakannya semakin otoriter. Peristiwa gagalnya kudeta pada tahun 2016 yang dilakukan militer terhadap Erdogan membuat Erdogan mengeluarkan keputusan bahwa Turki dalam keadaan darurat selama 3 bulan. Dalam masa darurat tersebut Erdogan memiliki kekuasaan untuk meniadakan kekuasaan parlemen dan membuat undang-undang baru, selain itu hak dan kebebasan rakyat dapat dibatasi (Pujayanti, 2016, hal. 5-6). Sampai pada tahun 2018 keadaan darurat Turki telah membuat 50.000 warganya ditahan dan 107.000 orang dipecat dari pekerjaannya, masa darurat tersebut nyatanya dijalankan oleh Erdogan selama 2 tahun hingga pada tahun 2018 keadaan darurat tersebut baru dicabut (Yasinta, 2018).

Selain tindakanya dalam membersihkan kelompok FETO di Turki, Erdogan juga melakukan Referendum Turki pada tahun 2017 untuk mengubah sistem pemerintahan Turki dari Parlementer ke Presidensial. Perubahan sistem ini sejatinya tidak melanggar prinsip demokrasi karena beberapa negara dengan sistem presidensial tetap menjalankan prinsip demokrasinya. Konstitusi baru tersebut meningkatkan kekuasaan presiden yang cukup tinggi dimana presiden dapat membubarkan parlemen, memilih menteri dan hakim serta beberapa wakil, dan mengeluarkan dekrit serta menghapus jabatan perdana menteri. Presiden dapat melakukan campur tangan terhadap peradilan serta menyatakan keadaan darurat negara secara sepihak (BBC, 2017).

Poin dalam perubahan sistem dari parlementer ke presidensial oleh Turki adalah pembagian kekuasaan *trias politica* yang menurut Jerman melanggar prinsip demokrasi. Presiden Erdogan membubarkan parlemen adalah suatu kebijakan yang tidak dapat diambil oleh negara negara lain yang menganut demokrasi. Kekuasaan presiden sangat mendominasi pemerintahan Turki, hal ini dipandang oleh Sigman Gabriel, menteri luar negeri Jerman bahwa Erdogan mulai mengarahkan politiknya secara otoriter. Tindakan Erdogan tidak sesuai dengan prinsip demokrasi Uni Eropa ditambah lagi referendum yang dilakukan berada dalam masa darurat dimana Erdogan memegang kendali pemerintahan dan Jerman mencurigai adanya kecurangan dalam proses pemungutan suara (Kirby, 2017). Turki dianggap kurang memahami posisinya sebagai calon anggota dan sistem di Uni Eropa. Kanselir

Jerman, Angela Merkel menyatakan bahwa kemunduran demokrasi di Turki dapat menjadi ancaman bagi keberlangsungan Uni Eropa (Smith-Spark, 2017). Uni Eropa dan Jerman menghentikan pembicaraan negosiasi sementara dalam proses Turki menjadi anggota Uni Eropa dan mengkaji lebih lanjut tentang Turki. Dalam kemenangan referendum didapat suara sebesar 51%, Jerman menganggap pengambilan keputusan besar tersebut belum layak karena hampir setengah dari masyarakat Turki tidak setuju dengan konstitusi barunya (Köhne, 2018).

2. HAM (Hak Asasi Manusia) dan Perlindungan Minoritas

Dalam beberapa kajian, penerapan HAM di Turki semakin maju karena sistem Sekuler radikal telah surut yang membuat hak hak masyarakat dalam beragama terpenuhi, namun Jerman masih menemukan kekuarangan dalam penegakan HAM di Turki yang sulit ditoleransi. Enam orang aktivis HAM ditangkap oleh Turki karena dianggap terlibat dengan kelompok teroris penyebab kudeta tanpa penjelasan yang lebih detail terkait penangkapan tersebut. Dari keenam aktivis yang ditahan, empat dibebaskan dan dua ditahan, salah satu yang ditahan adalah konsultan HAM warga Jerman Peter Steudtner. Kanselir Angela Markel menyatakan penangkapan tersebut tidak dapat dibenarkan. Jerman berusaha menyelesaikan masalah tersebut sebagai langkah dalam menegakan HAM baik bagi Jerman sendiri dan bagi Turki sebagai calon anggota Uni Eropa (Deutsche Welle, 2017).

Presiden Erdogan memiliki kebijakan yang mengundang kemarahan dari negara negara Eropa terutama Jerman. Kegagalan kudeta membuat Erdogan melakukan usaha untuk menghilangkan kegiatan yang menurutnya merusak demokrasi di Turki. Kebijakannya dalam menangani oposisi yang melakukan kudeta tersebut menjadi kritik karena Erdogan dinilai terlalu keras dalam menangani masalah tersebut. Pemerintah Turki mencurigai Fethullah Gulen Terrorist Organization (FETO) yaitu para pengikut Gulen sebagai dalang terjadinya kudeta. Pemerintah kemudian melakukan penangkapan FETO diseluruh elemen masyarakat baik militer, pegawai sipil, kepolisian, kehakiman dan pendidikan. Kurang lebih 45.000 orang ditahan dan akan didakwa oleh pengadilan. Para tahanan mengalami tindak kekerasan sehingga pemerintah dianggap melanggar HAM, hal ini juga sampai dikecam oleh Amnesty Internasional (Pujayanti, 2016, hal. 5-6).

Turki merupakan negara yang terdiri dari beberapa etnis yang salah satunya adalah suku Kurdi, sikap pemerintah Turki terhadap suku Kurdi selama ini dianggap tidak manusiawi, penangkapan dan pembunuhan yang dilakukan pemerintah Turki membuat sebagian masyarakat dari suku Kurdi melakukan migrasi. Tujuan aman bagi suku Kurdi untuk migrasi adalah Jerman. Pertambahan penduduk dari Kurdi membuat Jerman tidak dapat berpaling dari krisis tersebut. Selain tindakan Turki yang tidak sesuai dengan nilai nilai Uni Eropa, dampak langsung yang dirasakan Jerman membuat pemerintah lebih serius dalam mengintervensi permasalahan tersebut.

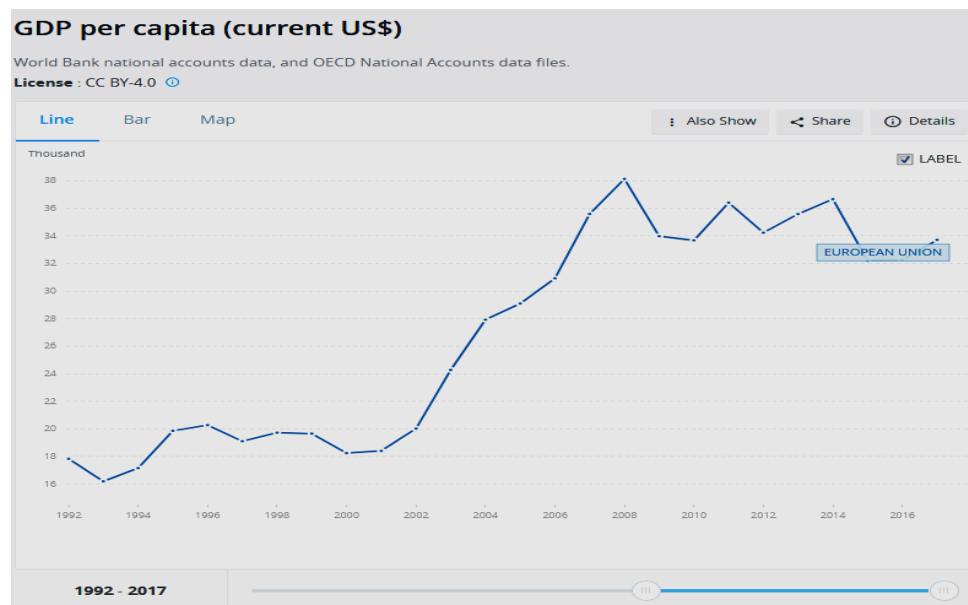
Pemerintah Turki tidak mampu menyelesaikan masalahnya dengan suku Kurdi namun seharusnya Turki tidak melakukan tindak kekerasan yang berdampak ke negara lain. Jerman memandang perlindungan terhadap minoritas di Turki sangat buruk (Schulz, 2015, hal. 10). Intensitas masalah pemerintah Turki dan suku Kurdi tersebut dapat menimbulkan masalah bagi Uni Eropa karena sistem Uni Eropa sendiri adalah *zona schengen* yang memungkinkan perpindahan penduduk secara bebas.

3. Supremasi Hukum

Penegakan hukum di Uni Eropa dilandasi oleh prinsip HAM dan demokrasi. Konflik yang terjadi dalam bidang HAM dan demokrasi di Turki berujung pada supremasi hukum yang tidak sesuai dengan kriteria Uni Eropa. Turki berencana mengeluarkan hukuman mati terhadap warganya yang terbukti terlibat dalam kudeta pada tahun 2016. Penerapan hukuman mati akan dilakukan melalui referendum. Sebagian warga Turki yang hidup di Jerman dapat melakukan pemungutan suara terkait hukuman mati tersebut. Jerman sangat keras menentang hukuman mati karena menciderai martabat hidup seorang warga negara. Uni Eropa juga menolak negara yang menerapkan hukuman mati menjadi anggota Uni Eropa, oleh sebab itu Jerman mengancam untuk memberhentikan proses negosiasi. Merkel mengatakan bahwa dengan diterapkannya hukuman mati di Turki maka Turki telah mundur dari calon anggota Uni Eropa (Deutsche Welle, 2017).

4. Ekonomi

Dalam pilar Uni Eropa poin pertama tentang ekonomi, yaitu: penyatuan ekonomi dan moneter atau pasar tunggal Eropa yang biasa dikenal sebagai sistem *single market*. Sistem tersebut menciptakan satu mata uang dan menghilangkan hambatan dalam kerja sama ekonomi seperti halnya mobilisasi pasar, barang, jasa dan orang. Sistem tersebut terbukti mampu meningkatkan ekonomi Uni Eropa.



Gambar 1 GDP per capita Uni Eropa 1992-2017 (World Bank , 2018)

Single Market merupakan keluaran dari nilai liberalisme yang dianut oleh Uni Eropa. Dalam pelaksanaanya, sistem tersebut memiliki kelemahan yang dapat memberikan kerugian pada negara anggota atau bahkan Uni Eropa itu sendiri. Aturan Uni Eropa dibuat untuk meminimalisir dampak negatif dari penyatuan Uni Eropa. Sistem *single market* membuat pergerakan manusia di

antara anggota Uni Eropa semakin bebas. Prinsip liberalisasi di Uni Eropa bahkan melebihi sistem pasar tunggal di kawasan-kawasan lain. Sistem mata uang bersama dapat membuat negara anggota yang tidak mampu mengejar ketertinggalan ekonominya semakin terpuruk karena nilai mata uang yang tidak sesuai dengan kondisi negaranya. Selain itu pergerakan barang, jasa dan orang yang bebas dapat menyebabkan kesenjangan di negara-negara anggota dan pertumbuhan populasi di satu negara menjadi berlebih. Hal itu menyebabkan peningkatan taraf persaingan di negara kaya serta kemunduran di negara miskin. Oleh karena itu ekonomi menjadi salah satu tolak ukur yang kuat bagi calon negara anggota yang ingin bergabung dengan Uni Eropa.

Kerja sama perekonomian antara Turki dan Uni Eropa telah dimulai sejak lama bahkan sebelum Uni Eropa terbentuk. Namun peningkatan ekonomi Turki berjalan sangat lambat hingga pada masa pemerintahan Erdogan perekonomian Turki meningkat dengan pesat. Prestasi besar Turki dalam meningkatkan perekonomian ini membuatnya diakui sebagai negara yang cukup penting untuk diperhitungkan pengaruhnya di regional oleh negara-negara Eropa bahkan Amerika. Kedekatan Turki dan negara-negara Timur Tengah membuatnya menjadi salah satu negara yang cukup kuat dalam pertarungan politik di Timur Tengah. Uni Eropa merupakan mitra ekonomi Turki yang sangat besar, terutama Jerman. Keinginan Turki untuk menjadi anggota Uni Eropa juga untuk meningkatkan kerja sama ekonominya dengan negara-negara tersebut (Turhan E. , 2015, hal. 16-19).

Kondisi perekonomian di Turki memungkinkan dampak positif dan negatif. Hal ini menjadi pertimbangan bagi Uni Eropa untuk memprediksi masa depan negara-negara anggota saat ini dalam bidang ekonomi apabila Turki menjadi anggota Uni Eropa. Permasalahan yang dihadapi oleh Jerman sendiri adalah bagaimana ekonomi Turki dapat bertahan. Ekonomi Turki meningkat cukup drastis, namun bukan berarti peningkatan ekonomi tersebut dapat diterima begitu saja dalam arus perdagangan Uni Eropa. Pertahanan ekonomi berkaitan erat dengan kondisi politik dan hubungan internasional suatu negara. Kondisi politik Turki yang sangat mengkhawatirkan dapat membuat investor asing mengurungkan niatnya untuk berinvestasi di Turki dan beberapa perusahaan Jerman di Turki juga mengalami kesulitan karena gejolak politik di Turki. Kekuatan stabilitas negara bukan hanya tentang ekonomi saja namun juga politik serta keamanan, jika kondisi politik dan keamanan Turki terus menurun maka akan memungkinkan perekonomiannya jatuh dan hal itu akan berdampak besar bagi Uni Eropa. Jerman selalu meminta Turki untuk menjaga stabilitas politik dan keamanannya agar perekonomiannya dapat bertahan dari krisis. Perundingan di Uni Eropa juga mengalami kebuntuan dalam membicarakan stabilitas politik dan bisnis di Turki (Turhan E. , 2015, hal. 17-19).

Negosiasi Turki untuk menjadi anggota Uni Eropa telah berjalan sejak tahun 2005, dan sejak saat itu negosiasi tidak menemukan titik terang. Dalam negosiasi yang membahas 35 bab *Acquis criteria* hanya 16 bab yang berhasil dibuka

negosiasinya. Jerman selalu mendorong pembukaan bab-bab baru dalam negosiasi, namun kondisi Turki sendiri terkadang membuat Jerman terpaksa menunda atau bahkan menutup bab negosiasi tertentu. Dari 16 bab negosiasi yang telah dibuka, terdapat bab yang ditutup sementara negosiasinya yaitu bab 25 tentang *Science and Research* karena bab tersebut secara khusus tidak memerlukan transformasi hukum Uni Eropa ke dalam hukum domestik calon anggota. Turki dinilai mampu meningkatkan bidang tersebut, hanya saja perlu adanya proses integrasi *Science and research* Turki kedalam Uni Eropa sehingga ditutup sementara dan dilanjutkan ke bab baru (European Commission, 2018).

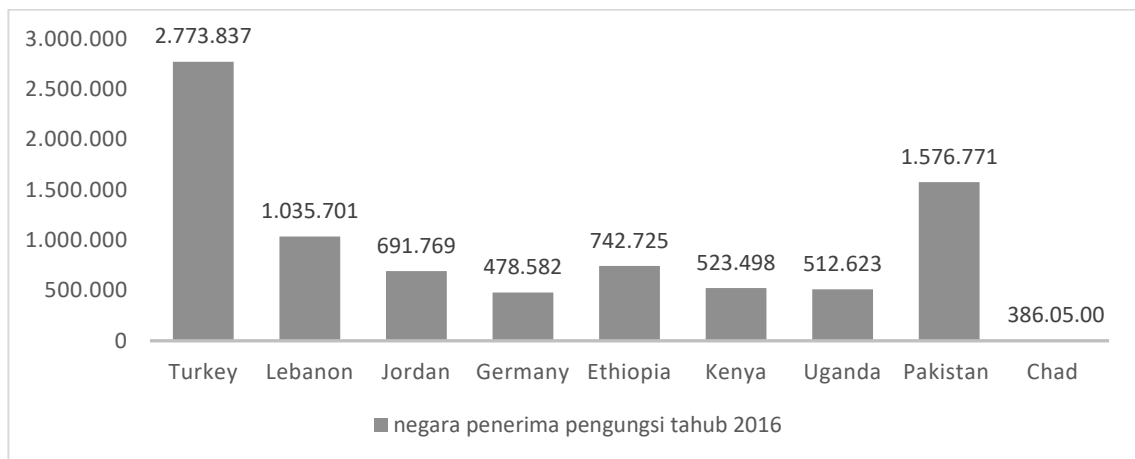
Pemerintah Jerman memiliki sikap yang tidak konsisten terhadap pembukaan Bab 22 tentang *Regional policy and coordination of structural instruments*. Satu hari sebelum kunjungannya ke Turki terkait bisnis, Kanselir Jerman Angela Merkel menyerukan pembukaan dari bab 22 pada Februari 2013. Merkel menyatakan dukungannya untuk pembukaan bab baru dalam negosiasi Turki dengan Uni Eropa, terlepas dari pribadinya yang ragu dengan pembukaan tersebut karena Merkel ingin negosiasi tersebut bergerak maju. Dalam pertemuannya dengan Turki, Merkel menegaskan kembali dukungannya untuk pembukaan bab yang terkait dengan kebijakan regional selama pertemuan di Ankara. Dukungan Merkel dibicarakan ketika para delegasi utama dunia bisnis dari Jerman bermaksud untuk memperdalam hubungan ekonomi bilateral dengan mitranya di Turki (Turhan E. , 2016, hal. 26-28).

Pada akhir Juni 2013, pemerintah federal Jerman menekankan keberatannya yang kuat untuk mempercepat proses negosiasi. Jerman mengeluarkan hak veto pada Bab 22 yang secara tidak langsung mengarahkan pandangannya terhadap penanganan pemerintah Turki terhadap demonstrasi Gezi Park, yang dimulai pada akhir Mei 2013 untuk memprotes rencana pembangunan perkotaan untuk Taksim Square di Istanbul. Seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri Jerman menyatakan bahwa waktu pembukaan bab ini adalah 'masalah teknis' dan tidak terkait langsung dengan demonstrasi di Turki. Namun, ia menambahkan, bahwa ada konteks politik secara keseluruhan, dan seperti yang selalu terjadi akhirnya semua terhubung antara satu dengan yang lain (Busse, Majid and Nikolas, 2013). Alasan apa pun yang mendasari Jerman dalam memblokir pembukaan Bab 22, faktanya tetap bahwa ia berhasil memaksakan sikapnya terhadap proses akses Turki di seluruh Uni Eropa. 24 negara anggota lain mendukung pembukaan pada Bab 22. Hak veto Jerman didukung oleh hanya dua negara anggota, yaitu Belanda dan Austria. Pada akhirnya kepala negara atau pemerintah negara-negara anggota setuju terhadap proposal Jerman untuk menunda pembicaraan dengan Turki. Pembukaan bab 22 akan dilakukan sampai presentasi laporan terkait kemajuan kondisi di Turki. Jerman akhirnya mengajukan pembukaan bab 22 pada oktober 2013 (Turhan E. , 2014, hal. 2-3).

Pada tahun 2015, Uni Eropa dihadapi oleh krisis pengungsi dari Siria ke Eropa. Keresahan yang terjadi di Eropa dengan pengungsi yang terus berdatangan mendorong kesepakatan Uni Eropa dengan Turki sebagai negara yang menjadi salah satu jalan bagi pengungsi Siria yang ingin pergi ke Eropa. Pada tahun 2015, Para

pemimpin Uni Eropa melakukan negosiasi dengan Ahmet Davutoglu, Perdana Menteri Turki berhasil membuat kesepakatan antara Turki dan Uni Eropa untuk menangani masalah pengungsi, Turki sebagai gerbang bagi para pengungsi yang akan pergi ke Eropa sepakat untuk membendung pengungsi dan membuat kamp pengungsi yang cukup luas untuk menampung gelombang pengungsi dari Siria, sebagai hasil kesepakatannya, Turki dijanjikan akan mendapat bantuan dana dari Uni Eropa, dibukanya bab baru dalam negosiasi akses Turki di Uni Eropa dan liberalisasi visa Uni Eropa akan diberlakukan di Turki (The Federal Chanselor , 2015).

Kanselir Jerman Angela Merkel mendukung Turki dalam membendung arus imigran dan mengupayakan mengganti dana Turki yang digunakan untuk mengatasi imigran karena dana yang digunakan Turki untuk mengatasi imigran cukup besar dan kesepakatan dengan Uni Eropa, Turki meminta bantuan hanya sebesar tiga miliar Euro. Merkel sangat diuntungkan dengan kesepakatan tersebut mengingat besarnya penentangan terhadap dirinya dalam mengatasi arus pengungsi baik dalam negeri Jerman maupun di Uni Eropa itu sendiri (Yf, 2015). Turki akhirnya menjadi negara terbesar yang menerima pengungsi dari Siria dibanding negara negara lain, pada gambar 3.2 berikut data penerimaan pengungsi dari Siria di beberapa negara.



Gambar 2 jumlah pengungsi yang diterima negara tahun 2016, (UNHCR, 2016)

Kesepakatan Turki dan Uni Eropa menguntungkan kedua belah pihak, namun keuntungan terbesar ada pada Uni Eropa karena pengurangan drastis arus pengungsi yang berhasil ditangani oleh Turki. Namun Turki mendapati keuntungan dibawah Uni Eropa karena bantuan dana yang cukup lambat dan bebas visa yang belum dapat di setuju di parlemen Eropa. Selain itu negosiasi akses Turki ke Uni Eropa yang dijanjikan untuk dipercepat masih belum menghasilkan kemajuan yang signifikan dan justru berhenti di tahun 2016 (Lesley Dudden, 2017). Uni Eropa melakukan penangguhan terhadap proses negosiasi dikarenakan kondisi Turki yang mengkhawatirkan. Gejolak politik Turki pasca gagalnya kudeta Erdogan oleh oposisi menjadi tolak ukur Uni Eropa dalam melihat Turki sebagai negara yang tidak dapat memenuhi kriteria. Penangguhan dilakukan untuk memberi kesempatan terhadap Turki memperbaiki kondisi domestiknya. Selama masa penangguhan tersebut Jerman dan Uni Eropa memperhatikan politik domestik Turki yang justru semakin menjauh

dari kriteria Uni Eropa. Sehingga penangguhan tersebut belum dicabut dan Turki masih dalam status calon anggota Uni Eropa (Taylor, 2017).

Turki mengancam akan berhenti dari kesepakatan imigran dengan Uni Eropa karena janji Uni Eropa belum juga dipenuhi. Disisi lain, Uni Eropa kesulitan menangani tuntutan Turki tersebut karena gerakan populis di Eropa terus mengancam untuk menutup Turki dari kebijakan bebas visa. Kedua belah pihak berada dalam kondisi yang sulit untuk melaksanakan kesepakatan tersebut. Angela Merkel menunjukkan kepedulianya dengan Turki dalam menangani pengungsi ditengah ketegangan hubungan bilateral Jerman dan Turki. Merkel mengunjungi Turki untuk membahas penanganan imigran dan menegaskan kondisi Turki yang sulit diterima oleh Uni Eropa yaitu penerapan HAM, demokrasi dan hukum di Turki yang dianggap telah menurun (Oltermann, 2016).

Turki sendiri ragu untuk mencabut kesepakatanya dengan Uni Eropa karena dengan itu bebas visa dan akses Uni Eropa akan benar benar berhenti. Jerman hanya mampu memberikan usulan untuk memberikan bantuan kepada Turki namun untuk persyaratan bebas visa itu sendiri Turki masih belum memenuhi syarat dari 72 persyaratan bebas visa di Uni Eropa yang termasuk pembahasan di bab 24. Salah satu yang menjadi perdebatan adalah Undang Undang anti teroris Turki yang berbeda dengan Uni Eropa. Terlihat bahwa perjanjian bebas visa dari kesepakatan masalah imigran justru tidak berguna karena Turki masih harus memenuhi kriteria bebas visa sesuai prosedur. Uni Eropa memberikan alasan yang jelas kenapa tidak

melaksanakan kesepakatan yang dibuat karena kondisi Turki yang semakin sulit untuk memenuhi kriteria Uni Eropa (Turkes, 2017, hal. 31-39). Sikap Uni Eropa memperlihatkan bahwa kesepakatan yang dibuat tahun 2015 tidak menguntungkan Turki kecuali dalam bentuk bantuan dana. Pada akhirnya Turki masih kesulitan dalam proses keanggotaan Uni Eropa.

Belum mampunya Turki dalam memenuhi prosedur untuk menjadi anggota Uni Eropa bukan sekedar kondisi alami. Turki justru cenderung tidak berkeinginan untuk internasilsasi dari beberapa syarat yang ada. Seperti saat Turki melakukan referendum konstitusi, rencana menjalankan hukuman mati dan pelanggaran HAM, semua itu merupakan kebijakan yang disengaja, bukan sebagai keadaan alami yang membuat Turki tidak dapat memenuhi kriteria. Dapat disimpulkan bahwa Turki tidak mampu menahan diri dari konstitusi yang telah terbentuk di dalam Uni Eropa. Hal ini sudah menjawab alasan Jerman menolak Turki dengan perspektif konstruktivisme Wendt bahwa self-restraint merupakan variabel penting dalam melakukan integrasi membentuk identitas kolektif. Pada tahun 2016 negosiasi terhenti hingga saat ini, status Turki sebagai calon anggota Uni Eropa semakin sulit karena tidak ada keputusan yang secara resmi dikeluarkan oleh Uni Eropa dan 35 bab pembahasan masih belum diselesaikan.

1.2 Analisis Intersubjektivitas Jerman dan Uni Eropa Terhadap Turki

Jerman memandang Turki sebagai rival yang berdasar pada budaya *lockean* karena terdapat proses transformasi intersubjektivitas Turki kedalam budaya *kantian*

yang belum terselesaikan. Pandangan Jerman membuat Turki belum dapat terintegrasi ke dalam *collective identity* Uni Eropa. Hubungan Jerman dan Uni Eropa dengan Turki mengalami ketegangan dan konflik selama proses keanggotaan Turki di Uni Eropa. Sebagian kondisi yang tegang dan konflikual telah dijelaskan di subbab sebelumnya. Secara khusus Jerman dan Turki mengalami konflik selama proses negosiasi baik itu berkaitan dengan prosedur keanggotaan Uni Eropa ataupun secara bilateral. Konflik yang terjadi membuktikan bahwa Jerman memandang Turki sebagai rival dalam budaya anarki *lockean system*.

Konflik dan ketegangan antara Turki dan Jerman atau bahkan dengan Uni Eropa memperlihatkan posisi kedua belah pihak berada dalam *lockean system* dan sedang dalam proses transformasi intersubjektivitas ke ranah *kantian system*. Menurut Wendt transformasi sistem budaya lockean menuju kantian untuk membentuk *collective identity* atau untuk berintegrasi ke dalam identitas kolektif yang sudah terbentuk dapat dilakukan dengan tiga variabel dalam “*Master variables*” yaitu: *interdependence, common fate, and homogeneity*. Ketiga variabel tersebut adalah konsep yang dapat menentukan apakah negara lain menjadi rival atau kawan. Ketiadaan salah satu variabel tersebut dapat menyebabkan negara memandang negara lain sebagai rival. Sebagai contoh pada masa perang dingin, Amerika tidak terancam dengan penguatan militer di Kanada karena adanya tiga variabel tersebut dalam intersubjektivitasnya namun Amerika merasa terancam dengan penguatan militer di Uni Soviet karena ketiadaan 3 variabel tersebut. Berikut ini akan dijelaskan konflik antara Jerman dan Turki serta tiga variabel efisien untuk membuktikan bahwa Jerman

melihat Turki sebagai rival dan menjadi jawaban dari penolakan Jerman untuk menerima Turki sebagai anggota Uni Eropa.

3.2.1 Konflik Jerman dan Turki

Sebagai respon dari kudeta yang terjadi di Turki, sebagian besar tokoh politik Jerman seperti Merkel, Martin Schulz, dan Cem Özdemir mengutuk upaya kudeta militer di Turki tepat setelah itu terjadi. Tokoh-tokoh tersebut juga mengingatkan Erdoğan untuk menghormati aturan hukum dan tidak menggunakan upaya kudeta sebagai alasan untuk semakin melemahkan oposisi pemerintah (Nienaber, 2016). Kepala Dinas Intelijen Federal Jerman (BND) berbicara untuk pemerintah ketika dia menyatakan bahwa dia tidak percaya organisasi Gulen berada di balik kudeta yang gagal (Martin, 2017). Ratusan pejabat militer Turki diasingkan di Jerman dan sebagian telah diberikan suaka. Pemerintah Turki telah membuat permintaan untuk ekstradisi orang-orang yang dianggap terlibat dalam upaya kudeta. Jerman belum membebaskan siapa pun untuk kembali ke Turki. Faktanya, Jerman pada Februari 2018 memberikan suaka kepada empat pejabat Turki lainnya, termasuk mantan kepala akademi militer, yang diklaim Turki sebagai anggota kunci dari kelompok kudeta 2016 (Channel News Asia, 2018).

Pemerintah Turki membalas dengan menahan lima wartawan Jerman dan aktivis hak asasi manusia. Sementara Presiden Erdoğan dengan berani menyarankan bahwa mereka dapat dilihat sebagai sandera untuk ditukarkan dengan orang-orang yang ingin diekstradisi. Respon pemerintah Turki menghasilkan suasana yang lebih

buruk. Pemenjaraan Deniz Yücel telah menjadi isu yang sangat sensitif bagi Jerman dan menghasilkan seruan dari anggota parlemen *Green and Die Linke* untuk sanksi yang ditujukan terhadap presiden Turki. Bahkan Presiden Jerman Frank Walter Steinmeier dalam pidato pengukuhan nya menyerukan agar Yücel dibebaskan (Szabo S. F., 2018, hal. 10).

Ketegangan mulai meningkat pada Juni 2016 ketika parlemen Jerman mengadopsi resolusi yang menyatakan pembunuhan orang-orang Armenia oleh pasukan Turki Ottoman selama Perang Dunia Pertama sebagai genosida. Hal ini menyebabkan Turki menarik duta besarnya di Jerman. Hubungan memburuk lebih lanjut setelah upaya kudeta gagal 15 Juli 2016 di Turki. Fakta bahwa tidak ada pejabat senior Jerman yang datang ke Turki untuk mengungkapkan solidaritas di hari-hari dan minggu-minggu berikutnya setelah kudeta yang gagal, dipandang secara negatif. Banyak orang Turki memandang bahwa Uni Eropa kecewa karena kudeta gagal dan lebih prihatin dengan penahanan ribuan tentara, hakim dan lainnya sehingga Turki mencurigai keterlibatan Jerman dan Uni Eropa dalam kudeta tersebut dan menganggap Jerman tidak mendukung demokrasi Turki (Schmidt, 2017).

Jerman menolak untuk mengekstradisi orang-orang yang PKK dan gerakan Fethullah Gülen, yang dituduh oleh Turki sebagai dalang kudeta yang gagal. Akibatnya Turki menolak izin delegasi parlemen Jerman untuk mengunjungi pasukan Jerman yang ditempatkan di pangkalan udara Incirlik Turki. Hal itu menyebabkan Jerman merelokasi pasukannya ke Pangkalan Udara Al-Azraq di Yordania.

Hubungan bilateral semakin memanas karena Turki menuduh Jerman dan negara-negara anggota lainnya ikut campur dalam referendum konstitusi 16 April 2017, dengan mencegah para Menteri Turki dari berkampanye di Jerman menjelang referendum. Hal ini mengakibatkan Presiden Recep Tayyip Erdogan menuduh Jerman melakukan "praktek Nazi", dan penyebutan tersebut masih sangat menyinggung perasaan orang Jerman (Osborne, 2017).

Jerman menciptakan istilah “Turki baru” karena Turki cenderung semakin tidak liberal. Selama keadaan darurat yang dinyatakan oleh Turki pasca upaya kudeta gagal terus berlanjut, Jerman tidak akan melakukan ekstradisi karena Jerman tidak memiliki keyakinan dalam sistem hukum di Turki. Selain itu, Jerman menganggap Turki melakukan campur tangan dalam urusan domestik Jerman dengan menyerukan kepada orang Turki-Jerman untuk tidak memilih partai-partai utama Jerman dan mengadakan rapat umum di Jerman. Tindakan tersebut menciptakan ketegangan Jerman dan Turki karena Turki berusaha untuk mempertahankan pengaruh dan menguasai komunitas Turki-Jerman. Keberhasilan pengaruh ini ditunjukkan ketika 63% pemilih orang Turki-Jerman yang terdaftar di Jerman sekitar 400.000 orang mendukung amandemen konstitusi yang diusulkan pada tahun 2017. Penguasaan pemerintah Turki terhadap orang Turki-Jerman juga ditunjukkan saat pemilihan parlemen Turki Pada bulan November 2015, hampir 60% orang Turki-Jerman memilih partai AKP. Penguasaan tersebut tentu membuat Jerman marah ketika pemerintah Turki mengkampanyekan pendapatnya terhadap orang-orang Turki-Jerman untuk memilih partai tertentu di Jerman. Banyaknya pendukung Erdogan di

Jerman membuat kampanye tersebut berbahaya bagi partai di Jerman dan merupakan tindakan yang tidak menghargai kedaulatan Jerman (Schmidt, 2017).

Pendekatan pemerintah Jerman dalam masalah bilateral tersebut melalui narasi berharap bahwa Turki akan bersikap lebih damai terhadap Jerman. Faktanya Turki terus membalas tindakan Jerman dengan tindakan yang menantang sehingga membuat Jerman melakukan pengkajian ulang kebijakannya terhadap Turki dalam berbagai bidang terutama ekonomi. Kondisi Turki yang dinilai semakin memburuk akan mempengaruhi perusahaan Jerman di Turki dan bentuk investasi lainnya. Merkel mengumumkan pada konferensi pers musim panasnya pada bulan Agustus bahwa Jerman akan memveto negosiasi dan menggarisbawahi bahwa tidak akan ada kemajuan dengan Turki, jika aturan hukum tidak dijamin di Turki. Jerman juga menyerukan penangguhan bantuan *pra-accession* (IPA). Akhirnya, selama debat dengan pemimpin Partai Sosial Demokrat (SPD) Martin Schulz pada 3 September, Merkel menyatakan bahwa Turki tidak bisa dan tidak boleh diizinkan untuk menjadi anggota Uni Eropa. Merkel juga mengumumkan rencana untuk membahas masa depan perundingan aksesi Turki dengan anggota Uni Eropa lainnya setelah Turki memperbaiki kondisi domestiknya (Schmidt, 2017). Perdana Menteri Jerman, Sigman Gabriel mengatakan Turki saat ini tidak ada, Turki akan muncul kembali saat Erdogan tidak lagi memerintah (Tadevosyan, 2017). Pernyataan tersebut menunjukkan sentimen Jerman terhadap Erdogan yang dianggap tidak serius dalam mengintegrasikan Turki kedalam Uni Eropa.

3.2.2 Interdependence

Interdependence (saling ketergantungan) adalah meningkatnya interaksi yang semakin intens dikarenakan adanya hubungan dagang atau arus modal antar agen dan keterikatan geografis yang meningkatkan ketergantungan untuk saling menguntungkan (Wendt A. , 1999, hal. 344). Kerja sama bilateral antara Jerman dan Turki mengalami banyak masalah baik secara bilateral maupun terkait akses Turki ke Uni Eropa. Bagaimanapun, Turki tetap membutuhkan Jerman dalam kemajuan ekonominya karena Jerman adalah mitra ekonomi Turki paling besar. Jerman tidak bergantung penuh terhadap perekonomian Turki. Bagi Jerman, Turki merupakan mitra ekonomi yang cukup besar dan banyaknya jumlah penduduk Turki di Jerman mendorong kemajuan ekonomi, baik sebagai pekerja ataupun tenaga ahli perusahaan (Yeneroğlu, 2016, hal. 11-19).

Faktor ketergantungan lainnya adalah bahwa Turki membutuhkan Uni Eropa dalam mempertahankan demokrasi dan memajukan ekonomi Turki, sedangkan Uni Eropa bergantung pada stabilitas Turki sebagai negara di perbatasan antara Eropa dan Timur Tengah. Uni Eropa harus selalu memastikan kestabilan Turki untuk menjamin keamanan di wilayah Eropa. Mengingat kondisi di Timur Tengah yang masih konflikual, Jerman memahami pentingnya Turki sebagai benteng dari Uni Eropa untuk menahan konflik di Timur Tengah masuk kedalam Eropa baik dalam bentuk arus imigran ataupun meluasnya peperangan (Schulz, 2015, hal. 10-12). Selain itu Turki memiliki aliran bahan mentah, sumber energi, dan tenaga kerja murah dibanding masyarakat Eropa. posisi geografis Turki di perbatasan Eropa dan Asia

memberi keuntungan bagi Eropa sebagai penghubung antara Eropa dan Asia. Salah satu keuntungan geografis adalah Pipa minyak Baku-Jeyhan yang akan membawa minyak Azerbaijan ke pantai Mediterania Turki melalui Georgia. Azerbaijan dengan cadangan minyak yang sangat melimpah berencana memasarkan cadangan energinya ke pasar dunia melalui Georgia dan Turki (Adnan, 2012, hal. 166).

Dalam hal perekonomian, Turki sebagai calon anggota telah mendapatkan bantuan ekonomi dari Uni Eropa untuk menstabilkan kondisi Turki sehingga dapat memenuhi kriteria untuk berintegrasi kedalam Uni Eropa. Dalam kerja sama di bidang imigran pada tahun 2015, Turki mendapat bantuan dana untuk menangani masalah imigran (The Federal Chanselor , 2015). Turki menjadi negara yang sangat diuntungkan bahkan dengan statusnya yang masih menjadi calon anggota. Ketergantungan yang tercipta antara Turki dan Jerman atau Uni Eropa belum seimbang karena Jerman dan Uni Eropa tidak bergantung secara penuh pada Turki untuk mencapai kemajuan ekonomi politik Uni Eropa. Apa yang membuat Uni Eropa bergantung pada stabilitas Turki adalah karena Turki merupakan negara tetangga yang akan memberikan efek domino jika Turki mengalami krisis.

Komisi dan Dewan Uni Eropa dalam laporan kemajuan Turki tahun 2011, menyatakan bahwa Turki adalah negara kunci bagi Uni Eropa untuk menjalin hubungan yang lebih intens dengan engara negara di Asia. Selain itu Uni Eropa mengakui potensi pertumbuhan ekonomi Turki dimasa mendatang dan peran Turki yang relevan untuk ketahanan energi di Eropa (European Parliament , 2012). Bagaimanapun, yang dipaparkan oleh Uni Eropa masih dalam bentuk potensi

ketergantungan yang dapat dicapai untuk menjaga stabilitas kawasan. Interdependensi seperti itu hanya dapat memberikan hasil yang positif ketika dibingkai dalam konteks komitmen bersama. Hal ini membutuhkan upaya dari kedua belah pihak. Dengan meningkatkan kerja sama dan koordinasi di bidang-bidang seperti kebijakan luar negeri, perang melawan terorisme, dan keamanan regional, maka akan ada banyak keuntungan bagi Turki dan Uni Eropa (CDA, 2011).

Kondisi saat ini memperlihatkan bahwa Turki membutuhkan Uni Eropa untuk kemajuan Turki sedangkan Uni Eropa membutuhkan Turki untuk menjaga stabilitas kawasan. Ketergantungan semacam ini bukan tercipta karena Turki mampu menjadi poros penting bagi ekonomi Uni Eropa, namun Turki diuntungkan dari sisi geografisnya. Untuk mencapai ketergantungan yang seimbang, Turki harus mampu menjadi negara yang stabil dalam bidang ekonomi dan politik agar dapat memberi keuntungan nyata bagi Uni Eropa sehingga efek positif Turki terhadap Uni Eropa lebih tinggi dari efek negatifnya. Variabel ini merupakan salah satu variabel yang dapat dibangun oleh Turki dengan modal awalnya sebagai negara yang berada di perbatasan Eropa-Asia. Ketidakstabilan ekonomi dan politik Turki membuat Jerman memandang Turki sebagai ancaman dan bukan peluang untuk memajukan kesejahteraan kawasan.

3.2.3 Common Fate

Common Fate (nasib yang sama) adalah sebuah kesamaan kondisi yang dialami oleh beberapa negara dikarenakan adanya faktor historis atau ancaman bersama. Secara historis Jerman dan Turki memiliki sejarah dimana keduanya sama-sama

mengalami kekalahan dalam Perang Dunia I dan pernah dipimpin oleh penguasa yang diktator. Jerman dan Turki harus melalui proses revolusi dalam memperbaiki kondisi domestiknya menjadi lebih demokratis. Saat ini keduanya tidak memiliki ancaman eksternal bersama. Jerman sebagai negara anggota Uni Eropa memiliki identitas sebagai masyarakat Eropa yang melihat imigran dari Timur Tengah merupakan sebuah ancaman bagi kestabilan Uni Eropa, sedangkan Turki menganggap para imigran bukanlah ancaman.

Di Eropa sendiri terdapat pandangan yang secara umum dilami oleh hampir seluruh negara Uni Eropa yaitu fenomena *xenophobia*, *islamophobia* dan *euroskeptisme*. Ketiga pandangan masyarakat tersebut tidak hanya berupa gagasan atau pandangan sosial namun juga menjadi sebuah gerakan di beberapa negara anggota Uni Eropa. Situasi semacam itu membuat pemerintah baik negara ataupun Uni Eropa melakukan antisipasi dalam menjaga kesejahteraan Uni Eropa. Konflik yang terjadi di Timur Tengah dan kedekatan secara geografis membuat kekhawatiran pemerintah terhadap stabilitas Uni Eropa meningkat. *Xenophobia* adalah pandangan sentimen yang timbul dari rasa takut yang dimiliki oleh seseorang terhadap orang asing, biasanya terhadap masyarakat yang berbeda dari populasi mayoritas. Sentimen ini menggiring terjadinya tindakan diskriminasi (Wistrich, 1999, p. 351).

Gelombang xenofobia di Eropa beberapa tahun terakhir sedang mengalami peningkatan. Peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2015 diiringi dengan peristiwa krisis imigran di Eropa. Krisis imigran ini juga menjadi peristiwa sejarah sepanjang terjadinya arus imigran masuk ke Eropa. Mayoritas imigran tersebut berasal dari

negara-negara Timur Tengah yang sedang terjadi konflik (Chan, 2015). Akibat dari peristiwa ini, Jerman mendukung Uni Eropa memilih untuk mendistribusikan seluruh imigran merata ke negara-negara anggota. Tidak semua negara setuju dengan keputusan ini, bahkan masyarakat di seluruh penjuru Eropa banyak melakukan protes. Masyarakat Eropa berpendapat bahwa imigran hanya membawa dampak buruk bagi negara terutama imigran yang berasal dari negara-negara konflik. Bukan hanya masyarakat saja yang tidak ingin imigran masuk ke dalam negaranya, beberapa negara juga telah menutup diri untuk imigran Muslim dan hanya akan menerima imigran Kristen. Para imigran dianggap memiliki sifat yang buruk seperti malas untuk berintegrasi dan bodoh sehingga akan menjadi beban negara saja. Selain itu, masyarakat tidak ingin perhatian pemerintah terfokuskan kepada imigran sementara angka pengangguran masih tinggi (Jones & Stan, 2017). Belum lagi imigran yang berasal dari negara-negara di Timur Tengah membuat sikap Islamofobia masyarakat Eropa turut meningkat.

Islamofobia merupakan sikap takut dan benci yang dirasakan masyarakat hanya kepada Muslim. Imigran Muslim digeneralisasi hanya akan menimbulkan masalah negara seperti serangan-serangan teroris yang akan di bawa dari Timur Tengah. Selain itu, budaya Muslim sangat berbeda dengan budaya Eropa sehingga budaya Muslim hanya akan menjadi ancaman bagi budaya masyarakat Eropa. Budaya Islam dirasa tidak cocok dengan budaya Eropa sehingga sulit berintegrasi. Masyarakat juga tidak ingin adanya proses Islamisasi terjadi di Eropa karena melihat bahwa Islam merupakan agama terbesar di dunia. Menyebarnya masyarakat Eropa yang bebas

membuat identitas yang relatif sama (Arif, 2015, hal. 1-4). Leitkultur Jerman juga memandang bahwa integrasi harus dilakukan dengan perubahan identitas imigran. Partai CDU yang mendominasi pemerintahan saat ini memiliki keyakinan dalam mendefinisikan leitkultur Jerman yang didalamnya menyertakan budaya kristen-yahudi. Leitkultur Jerman menjadi salah satu pedoman berfikir masyarakat Jerman dan Eropa dalam mendefinisikan integrasi yang harus dilakukan dalam kesatuan Uni Eropa. Permasalahan yang terjadi adalah leitkultur Jerman meniadakan toleransi bagi masyarakat imigran yang tidak berafiliasi terhadap leitkultur Jerman.

Pandangan Islamophobia dan xenophobia di Eropa semakin meningkat dengan adanya kebijakan pengungsi oleh Jerman dan Uni Eropa. Kritik masyarakat terhadap kebijakan tersebut berujung pada kritik sistem di Uni Eropa sebagai organisasi internasional yang mengharuskan kesepakatan bersama antar negara. Penerimaan pengungsi yang terus berlanjut di Jerman dan kebijakan Uni Eropa dalam membagi jumlah pengungsi di Eropa mengakibatkan gerakan euroskeptisme semakin meningkat. Hal ini terbukti dari peningkatan dukungan masyarakat terhadap gerakan populis dari partai partai di negara anggota Uni Eropa. Merkel yang sebelumnya selalu mendapatkan suara cukup banyak kini berkurang karena kebijakan Merkel yang terus menerima pengungsi. Masalah pengungsi semakin penting karena telah bersinggungan dengan gerakan euroskeptisme yang berpotensi menghancurkan identitas kolektif Uni Eropa (The Economist, 2015).

Euroskeptis tidak hanya terjadi di negara negara Uni Eropa, Perkembangan anti islamisme di Eropa yang semakin tinggi membuat keinginan Turki untuk menjadi

anggota Uni Eropa dengan reformasi dalam usaha integrasinya semakin menurun (Kösebalaban, 2011, hal. 160). Euroskeptis di Turki sendiri mulai berkembang sampai ketataran pemerintah. Islam nasionalis yang anti barat semakin diuntungkan dengan lambatnya proses akses Turki ke Uni Eropa dan membuat pandangan pesimis terhadap Uni Eropa. Perkembangan pandangan tersebut merupakan dampak dari proses akses yang lama namun juga menjadi alasan bagi Jerman untuk menolak Turki karena paham tersebut semakin berkembang. Euroskeptisme berkembang ditataran AKP, MHP dan pendapat publik di Turki. Dukungan masyarakat untuk pemerintah dalam akses ke Uni Eropa masih ada walaupun Euroskeptisme di Turki semakin berkembang. Semakin lama akses Turki di Uni Eropa maka akan membuat paham euroskeptis semakin meningkat dan akan menimbulkan perpecahan baru dalam politik domestik di Turki sehingga harapan akses akan semakin jauh (Yilmaz, 2011, hal. 19-20).

Perspektif Xenophobia dan Islamophobia tidak menjadi ancaman bagi Turki karena imigran Timur Tengah merupakan masyarakat dengan etnis dan budaya yang sama dengan Turki dan agama islam di Timur Tengah juga menjadi agama mayoritas di Turki. Perspektif Euroskeptisme sendiri bukan ancaman bagi Turki karena paham tersebut justru berkembang sampai ke ranah elit politik. Hal ini memperlihatkan bukan hanya perbedaan pandangan antara Turki dan Jerman serta Uni Eropa dalam memandang ancaman dari luar. Namun Turki sendiri semakin lama berkembang menjadi ancaman bagi Jerman dan Uni Eropa. Melihat tensi dari pandangan masyarakat Eropa terhadap imigran dapat meningkatkan skeptisme terhadap akses

Turki di Uni Eropa karena kesamaan budaya Turki dan negara negara di Timur Tengah dan perbedaan identitas Turki dengan Eropa.

3.2.4 *Homogeneity*

Masuknya Turki kedalam Uni Eropa akan menciptakan perpindahan penduduk dari Turki menyebar ke negara negara di eropa. Hal ini dapat menyebabkan peningkatan paham xenophobia dan islomphobia dimasyarakat. Ketidak puasan masyarakat terhadap keputusan Uni Eropa dalam menerima Turki akan menyebabkan pandangan euroskeptis semakin meningkat. Peningkatan tersebut akan menciptakan peluang besar gerakan populis untuk melawan identitas kolektif Uni Eropa. Hal ini menjadi kekhawatiran Jerman terhadap stabilitas Uni Eropa. Pada akhirnya tokoh politik liberal di Uni eropa seperti Merkel pun tidak mampu menghilangkan efek dari sikap intoleran sebagian besar masyarakat Eropa dalam menanggapi aksesi Turki di Uni Eropa. Selain krisis intoleran yang terjadi di Eropa, Jerman juga skeptis terhadap Turki karena kesamaan dan kedekatan Turki dengan negara negara di Timur Tengah (Aydin, 2015, hal. 22-25).

Turki dengan identitas islam liberal menjadi calon anggota Uni Eropa dan menawarkan sistem aliansi peradaban karena Turki sadar akan perbedaan identitas antara Turki dan masyarakat Eropa. Perbedaan identitas yang dimaksud cukup signifikan, mulai dari etnis, geografis, budaya, tradisi, agama mayoritas dan yang belakangan ini berkembang adalah perbedaan sistem politik karena referendum Turki. Integrasi adalah proses peleburan agen didalam sebuah intitusi atau tatanan sosial. Aliansi peradaban sendiri tidak sepenuhnya melakukan integrasi, Turki masih

mempertahankan National Habitus dan kepentingan Turki untuk bergabung dengan Uni Eropa adalah untuk mempertahankan demokrasi dan kemajuan ekonomi politik.

Penyebab Turki menjadi calon anggota Uni Eropa adalah faktor kedekatan Turki dengan negara-negara Eropa serta posisi geografisnya di Eurasia. Pada tahun 1963 Turki dan EEC membentuk asosiasi kerja sama melalui Ankara Agreement. Posisi Turki adalah negara diluar EEC yang menjalin kerja sama ekonomi tanpa dilibatkan dalam proses pembentukan kebijakan di EEC (Ministry of Foreign Affairs Directorate for EU Affairs, 2017). Hal ini menunjukkan bahwa dalam sejarahnya pun Turki tidak pernah bergabung dalam komunitas Eropa secara penuh dan terbentuknya Ankara Agreement untuk membawa Turki menjadi salah satu anggota EEC adalah keputusan yang diambil EEC karena organisasi tersebut bergerak dalam bidang ekonomi. Transformasi EEC menjadi Uni Eropa dilakukan dengan perubahan kesepakatan yang sebelumnya fokus di bidang ekonomi menjadi lebih luas untuk membentuk identitas kolektif. Turki yang sudah mengajukan diri menjadi anggota EEC kemudian membuat Uni Eropa tidak dapat menarik keputusan tersebut dan memberi kesempatan Turki untuk menjadi anggota Uni Eropa. Turki seolah terjebak dalam kondisi identitas kolektif Uni Eropa yang telah bertransformasi dari sekedar kerja sama menjadi identitas kolektif sedangkan Turki memiliki banyak perbedaan identitas dengan Eropa.

Posisi geografis Turki hanya sebagian kecil yang berada di kawasan Eropa, dan sebagian besar di Asia. Bergabungnya Turki di Uni Eropa akan memperluas perbatasan Uni Eropa. Merkel dan presiden Perancis Nicolas Sarkozy tidak percaya

bahwa Turki bagian dari Eropa karena batas benua Eropa tidak sampai ke perbatasan Suihah dan Irak (Kösebalaban, 2011, hal. 159). Uni Eropa sebagai organisasi regional tidak mungkin dapat menerima anggota dari kawasan lain seperti Iran dan Arab karena batas regional yang ada. Kasus Turki memang berbeda karena ada sebagian kecil wilayahnya di benua Eropa. Status Turki sebagai negara di benua Eropa merupakan pemaksaan status karena faktor sejarah revolusi Turki yang berusaha mendekatkan diri ke Eropa, menteri keuangan Jerman Wolfgang Schäuble berpendapat bahwa Turki bukan negara Eropa dan seharusnya tidak bisa menjadi calon anggota Uni Eropa. Selain masalah geografis, perbedaan etnis dan budaya menandakan bahwa Turki seharusnya bukan bagian dari benua Eropa (Pipes, 2013). Hal ini menjadi jelas bahwa Turki tidak mungkin masuk Uni Eropa selama Turki dipahami sebagai bukan bagian dari Eropa oleh masyarakat dan tokoh politik Uni Eropa.

Uni Eropa memiliki peradaban tunggal sehingga menciptakan status masyarakat Eropa. Masyarakat Eropa merupakan kelompok masyarakat di benua Eropa dengan karakteristik budaya dan nilai nilai yang dipahami di Eropa. Peradaban merupakan kebiasaan dari sejarah panjang yang terjalin di wilayah tersebut. Sejarah tersebut dimulai dari warisan zaman Romawi dan Yunani kuno, kritisasi di Eropa, abad renaissance, humanisme, revolusi perancis, dan modernisasi pasca abad pertengahan. Perbedaannya dengan Turki bahwa sejarah yang dialami berbeda, peradaban Turki identik dengan nilai nilai islam mulai dari masa kenabian, khilafah, kerajaan Abbasiyah, dan Turki Usmani. Peradaban yang dijalani menciptakan budaya

yang berbeda seperti, perbedaan etnis, nilai kehidupan atau filsafat dimana Eropa dengan nilai kriten-yahudi dan Turki dengan islamnya. Selain itu perbedaan juga terbentuk secara fisik yaitu gaya arsitektur, musik, seni, dan sastra. Dapat disimpulkan bahwa Jerman dan Turki memiliki peradaban yang berbeda (Endrweit, 1998, hal. 1-7).

Bergabungnya Turki di Uni Eropa merupakan pertemuan dari dua peradaban sehingga Turki menawarkan sistem aliansi peradaban dalam integrasinya dengan Uni Eropa (Kösebalaban, 2011, hal. 157). Penawaran Turki sulit bagi Jerman untuk memposisikan Turki di dalam organisasi tersebut. Perbedaan identitas budaya secara konstitusi memang tidak diatur dalam syarat untuk menerima anggota Uni Eropa. Namun perbedaan identitas antara Turki dan masyarakat Eropa terlalu jauh. Perlu adanya sistem yang mengatur proses integrasi dalam bidang budaya dan agama, kenyataannya sistem tersebut hanya menginisiasi sikap masyarakat yang toleran. Faktanya imigran menjadi momok menakutkan bagi mayoritas masyarakat di Eropa, sedangkan prinsip toleransi tidak bisa jika hanya diterapkan dalam konstitusi atau pemerintahnya saja.

Sikap intoleran terhadap imigran tidak hanya di masyarakat Eropa namun juga terjadi di ranah elit politik Uni Eropa. Jerman memiliki apa yang disebut *Leitkultur* yang menjadi pandangan bagi Jerman dan masyarakat Eropa, serta identitasnya sebagai “kami” dalam konteks identitas kolektif Uni Eropa. Sedangkan Turki memiliki identitas dengan apa yang disebut demokrasi liberal yang masih mempertahankan identitasnya sebagai negara Islam modern atau Islam konservatif

dimana islam merupakan budaya dan keyakinan individu namun melakukan integrasi ekonomi dan politik ditengah komunitas negara barat. Leitkultur sendiri menuntut afiliasi budaya dari imigran dan pendatang sehingga perbedaan identitas Turki benar benar sulit untuk berintegrasi di Uni Eropa dan Turki sendiri memang tidak berniat untuk merubah identitas sosial budayanya dalam integrasi tersebut.

Pada dasarnya identitas kolektif bukan berarti menyatukan identitas budaya dan sosial tetapi menyatukan pandangan dan sikap toleransi terhadap perbedaan. Identitas kolektif itu sendiri dimaksudkan kepada persamaan nilai dan pandangan oleh negara terhadap negara lain, tentang bagaimana identifikasi negara lain itu sebagai kelompok yang sama atau berbeda. Oleh karenanya nilai bersama itu secara langsung maupun tidak menciptakan kategori tersendiri untuk mengidentifikasi negara lain sesuai kesepakatan kelompok. Hal itu yang kemudian memungkinkan identifikasi nilai budaya, etnis, tradisi, agama, geografis dan arah kebijakan politik sebagai tolak ukur dalam melihat negara lain sebagai bagian dari kelompok atau sebagai rival. Wendt juga menjelaskan bahwa heterogeneity dapat menjadi salah satu sumber konflik oleh karenanya homogeneity menjadi salah satu pendorong untuk terbentuknya identitas kolektif (Wendt A. , 1999, hal. 354).

Konflik yang terjadi antara Jerman dan Turki mulai memanasi sejak Turki menjadi calon anggota Uni Eropa dan arah kebijakan politik Turki berubah pasca gagalnya kudeta. Jerman mengidentifikasi dirinya sebagai “kami” untuk melihat Turki Sebagai calon anggota Uni Eropa, bahwa stabilitas politiknya harus selaras dengan standar Uni Eropa. Hal ini menjadi masalah karena Turki mencalonkan diri

menjadi anggota Uni Eropa. Terdapat kemungkinan saat Turki tidak mencalonkan diri menjadi anggota Uni Eropa, hubungan bilateral Jerman dan Turki akan tetap membaik karena Jerman mengidentifikasi dirinya sebagai “saya”. Hal ini kemudian menjadi jawaban kenapa Jerman menolak Turki karena Turki tidak mampu memenuhi keseluruhan dari “master variable”.

Intersubjektivitas dalam budaya kanton dapat dijalankan dengan salah satu dari 3 variabel efisien dan self-restraint. Jerman dan Uni Eropa dengan Turki memiliki ketergantungan dalam bidang ekonomi dan keamanan. Kemudian sebagai calon anggota. Turki harus memenuhi kriteria Uni Eropa, yaitu copenhagen criteria dan Acquis criteria yang menjadi self-restraint bagi calon anggota. Bentuk self restraint itu sendiri dapat berupa perjanjian atau kesepakatan yang membatasi negara atau aktor dalam intersubjektivitasnya. Jika Turki tidak menjadi calon anggota Uni Eropa, dalam kerja sama yang dilakukan Turki dan Jerman atau Uni Eropa akan dibentuk suatu kesepakatan baru yang menjadi self-restraint untuk Turki. Hal ini menyimpulkan bahwa Jerman memandang Turki sebagai rival disebabkan oleh pencalonan Turki menjadi anggota Uni Eropa.

Turki dapat menjalin kerja sama dengan Jerman dan Uni Eropa karena ketergantungan yang ada dan dapat membentuk kesepakatan untuk mengendalikan aktor dalam intersubjektivitas kedua pihak, ini merupakan budaya kanton namun bukan identitas kolektif. Jerman sendiri sudah melihat bahwa Turki dapat menjalin hubungan dalam budaya kanton bersama Jerman dan Uni Eropa, oleh karenanya Jerman memperkenalkan konsep “*privileged partnership*” yaitu posisi Turki sebagai

kemitraan istimewa bagi Uni Eropa. Konsep tersebut diajukan sebagai jalan tengah dimana Turki tidak mungkin diintegrasikan kedalam Uni Eropa, namun penolakan tanpa solusi akan menyebabkan konflik besar yang akan mengancam stabilitas Uni Eropa (Bürgina, 2010, hal. 420-422).

